

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

**Oleh
ALBAROYA**

Jaminan fidusia didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, akibat jaminan fidusia maka jika terjadi peristiwa pengalihan kendaraan bermotor maka perusahaan pembiayaan dapat mengambil kendaraan bermotor, karena jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Permasalahan penelitian adalah akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk dan proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan, studi komperatif dan studi dokumen dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah mengabulkan gugatan sebagian yaitu Penggugat mendapatkan BPKB atas mobil, serta Woto dan PT. Toyota Astra Financial Services telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih lanjut yang dapat terjadi adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklard*). Proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan satu (SP I) sampai dengan tiga (SP III) kepada debitur yang telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, dan apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka debitur akan dianggap wanprestasi sehingga pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi objek jaminan.

Kata Kunci: Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor, Pihak Ketiga, Kredit, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF TRANSFER OF RIGHTS TO A MOTOR VEHICLE TO A THIRD PARTY IN CREDIT WITH FIDUCIARY GUARANTEE

(Study Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

**By
ALBAROYA**

Fiduciary guarantees are registered with the Ministry of Law and Human Rights, as a result of the fiduciary guarantee, if a motor vehicle transfer event occurs, the financing company can take the motor vehicle, because the fiduciary guarantee has the same executorial power as a court decision. The research problem is the legal consequences of the transfer of rights to a motor vehicle to a third party in credit with fiduciary guarantees based on Decision Number: 210 / Pdt.G / 2020 / Pn.Tjk and the legal process for taking vehicle documents for motor vehicles that have been transferred to a third party in credit with fiduciary guarantees.

The research method used by the researcher is empirical legal research. The research approach used is a normative approach, namely an approach through literature studies, comparative studies and document studies by reading, quoting, and reviewing the rules or regulations related to the problems to be discussed.

The results of the research and discussion show that the legal consequences of the transfer of motor vehicle rights to a third party in a credit with fiduciary collateral based on Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk are to grant the lawsuit in part, namely the Plaintiff received the BPKB for the car, and Woto and PT. Toyota Astra Financial Services have committed an unlawful act, but the lawsuit filed does not meet the formal requirements, thus the lawsuit is qualified as containing formal defects, the further consequence that can occur is that the lawsuit is declared unacceptable (nietontvankelijke verklaard). The legal process for taking vehicle registration for motor vehicles that have been transferred to a third party in a credit with fiduciary collateral is carried out according to Law Number 42 of 1999 by providing a warning letter one (SP I) to three (SP III) to debtors who have experienced delays in installment payments, and if there is no response from the debtor, the debtor will be considered in default so that the creditor has the right to execute the collateral object.

Keywords: Transfer of Motor Vehicle Rights, Third Party, Credit, Fiduciary Guarantee.